

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Era digital membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi masyarakat, khususnya dalam mengakses informasi sosial dan politik melalui jaringan internet (Famoussyah, 2023). Generasi Z (usia 12–27 tahun) menjadi kelompok pengguna smartphone dan internet terbesar di Indonesia, dengan kontribusi mencapai 34,4 persen menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada Desember 2023–Januari 2024 (Riyanto, 2024). Sebagai digital natives, Generasi Z memiliki keterhubungan tinggi dengan media sosial dan dikenal kritis, inovatif, serta memiliki kesadaran sosial yang kuat (Judijanto, 2024).

Platform seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan X/Twitter berperan penting dalam membentuk wacana politik dan sosial, memungkinkan Generasi Z aktif menyuarakan opini serta mengorganisasi gerakan (Ariestandy, Adidharma, & Isdendi, 2024). Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran konsumsi informasi politik di Indonesia, yang ditandai oleh interaksi antara politik identitas dan penggunaan media sosial yang meluas (Judijanto, 2024).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana partisipasi politik warga negara dalam menyalurkan hak pilihnya untuk menentukan kepemimpinan di tingkat nasional maupun daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 22E ayat 3 (Adnan, 2024) (Fauzi, 2022). Pemilu

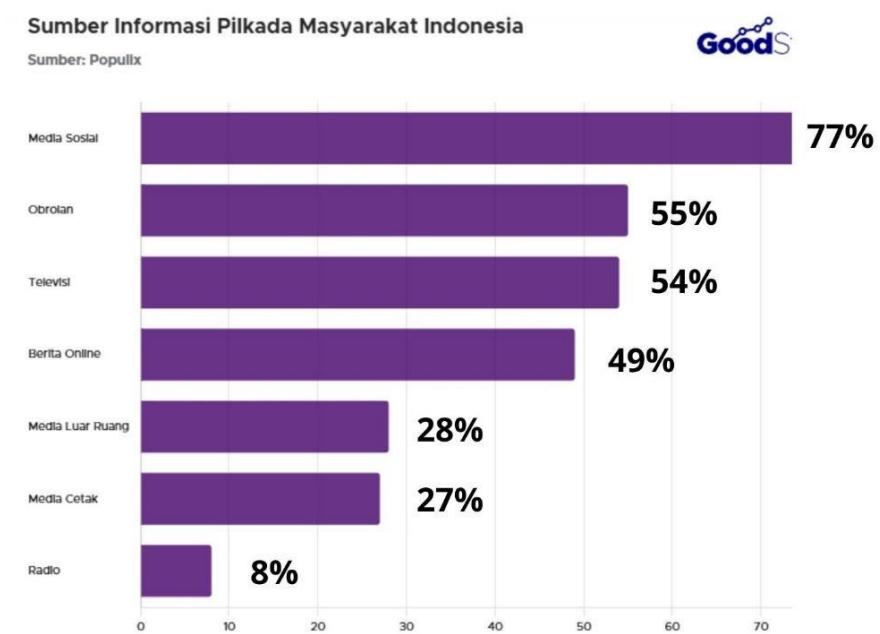
idealnya berlangsung secara sukarela, adil, dan berintegritas, berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang menjamin kesetaraan bagi seluruh calon (Ikajendra, 2023) (Heryanto, 2018, p. 127). Meskipun tidak ada sistem pemilu yang sepenuhnya ideal, pemilu tetap memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik, menjadi sarana evaluasi pemerintahan, serta mewujudkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme musyawarah dan perwakilan (Huda, 2018).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan era reformasi yang bertujuan memperkuat struktur pemerintahan dan otonomi daerah, serta menjadi manifestasi dari sistem demokrasi tidak langsung yang berlandaskan kedaulatan rakyat (Fauzi, 2022). Namun, pelaksanaan Pilkada serentak masih menghadapi berbagai anomali, salah satunya regulasi yang memungkinkan munculnya pasangan calon tunggal, yang berdampak pada terbatasnya pilihan politik bagi masyarakat (Heryanto, 2019, p. 177). Bagi Generasi Z, Pilkada menjadi momentum penting dalam mengekspresikan budaya politik baru yang lebih dinamis dan partisipatif melalui media digital (Arpandi, 2023). Dilansir KPU, sebanyak 203 juta orang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada serentak 2024, dengan 25,69% diantaranya merupakan Generasi Z, yang diperkirakan menjadi kelompok pemilih strategis dalam kontestasi politik mendatang (DetikNews.com, 2024). Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022, telah ditetapkan 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024 yang akan

bersaing memperebutkan suara pemilih (Heryanto, Ragam Persoalan Komunikasi Politik Indonesia, 2024, p. 141)

Budaya politik di kalangan Generasi Z cenderung lebih kritis dan berbasis isu, dengan kecenderungan menilai kandidat berdasarkan rekam jejak digital, transparansi, serta paparan isu melalui media sosial, meskipun tidak semua konten mempengaruhi perilaku memilih generasi ini (F Fatkurrahman, 2024). Media sosial berperan penting dalam membentuk komunikasi politik dan opini publik Generasi Z melalui interaktivitas dan jangkauan yang luas, yang memungkinkan generasi ini tidak hanya mengonsumsi tetapi juga memproduksi konten politik (Judijanto, 2024). Media sosial tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan sosial, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media alternatif kampanye politik yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Andriyendi, 2023).

Gambar 1. Penggunaan Media Sosial

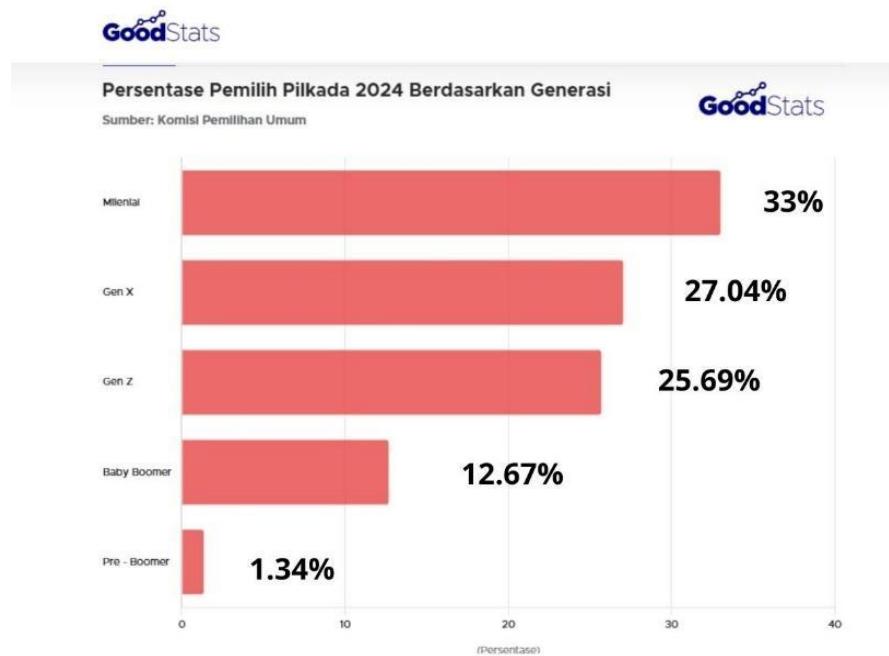


Sumber GoodStats diakses 7 februari 2025

Berdasarkan survei Populix pada November 2024, sebanyak 77% masyarakat Indonesia memperoleh informasi seputar Pilkada melalui media sosial, yang sebagian besar berasal dari berita online, tokoh politik, dan influencer; bahkan berita politik di media sosial menempati urutan keempat dengan persentase 49% sebagai sumber informasi utama (Populix,2024). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menggeser preferensi konsumsi informasi politik masyarakat dan tidak cukup jika hanya mengandalkan intensitas terpaan media; diperlukan narasi yang selaras dengan aspirasi pemilih untuk membangun keterikatan emosional antara pemilih dan kandidat (Heryanto, 2018, p. 128)

Partisipasi politik digital menjadi fenomena penting, terutama bagi Generasi Z yang menjadikan aktivitas seperti diskusi online, petisi, dan kampanye di media sosial sebagai ekspresi identitas sosial dan keterlibatan sipil (Judijanto, 2024). Partisipasi politik merupakan bentuk perilaku individu non-pemerintah dalam memengaruhi hasil politik tertentu, yang menjadi pondasi utama dalam sistem demokrasi Indonesia(Knoll, 2018, pp. 1-22) (Hemafitria, 2021). Partisipasi tersebut tercermin melalui keterlibatan dalam pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat (Andriyendi, 2023).

Gambar 1.2 Persentase Pemilih Pilkada



Sumber GoodStats diakses 7 Februari 2025

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan adanya penurunan partisipasi politik Generasi Z dalam Pilkada 2024 dibandingkan dengan partisipasi Generasi Z pada Pilpres dan Pileg 2024, yang menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu ke depan (Surianto, 2018). Penurunan ini mencerminkan paradoks politik di Indonesia, di mana meskipun akses Generasi Z terhadap media sosial semakin luas, keterlibatan Generasi Z dalam pemilu justru menurun. Padahal, media sosial menjadi ruang bagi Generasi ini dalam memperoleh informasi politik dan mendiskusikan isu-isu sosial (Mangune, 2018).

Fenomena ini disinyalir disebabkan oleh sifat apatis pada pemilih pemula yang belum memiliki pendidikan politik memadai. Dalam konteks ini, pendidikan pemilih berperan penting tidak hanya dalam meningkatkan

partisipasi pemungutan suara, tetapi juga dalam membangun keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik yang lebih luas (Maria, 2020) (Heryanto, Strategi Literasi Politik: Sebuah Pendekatan Teoritis dan Praktis, 2021, p. 129). Politik sebagai instrumen fundamental dalam kehidupan bernegara membutuhkan saluran komunikasi efektif agar warga negara dapat mengakses dan mempengaruhi struktur kekuasaan (Indrawan, 2023).

Partisipasi politik merupakan indikator utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, termasuk kontribusi Generasi Z dalam pemilu yang mencerminkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam urusan kenegaraan (Wardhani, 2018). Namun, rendahnya partisipasi, termasuk fenomena golongan putih (golput), menunjukkan lemahnya motivasi politik, terutama di kalangan Generasi Z yang meskipun aktif di ruang digital, belum sepenuhnya terlibat dalam praktik politik elektoral (Maulana, 2024).

Coverage international Johannes Knoll (2018), memaparkan pola partisipasi politik media sosial berupa upaya-upaya partisipasi politik dalam kategori tinggi dan rendah. Partisipasi digital seperti aktivisme daring dan kampanye di media sosial menjadi bentuk keterlibatan yang lebih kompleks, namun tidak semua individu memiliki literasi digital-politik yang memadai (Ashariana, 2024). Oleh karena itu, penguatan regulasi media melalui Undang-Undang Penyiaran, Pers, dan ITE sangat diperlukan untuk mendorong media yang bertanggung jawab serta memperkuat literasi politik dan media secara beriringan, guna membentuk masyarakat yang kritis dan sadar terhadap

dinamika politik (Heryanto, Strategi Literasi Politik: Sebuah Pendekatan Teoritis dan Praktis, 2021, p. 147)

Tabel 1.1 Bentuk Partisipasi Politik

	Upaya Rendah	Upaya Tinggi
Offline	Menampilkan tanda-tanda kampanye, menandatanganipetisi di jalan, mengingatkan seseoranguntuk memilih menyukai aktor	Menghadiri pertemuan politik, menghadiri demonstrasi politik, menghubungi kandidat politik
Online	Tujuan politik berbagai informasi politik, memposting komentar politik, mendatangani petisi online	Mengirim email ke politisi, menulis entri blog politik, telibat dalam diskusi politik, membuat grup politik di media sosial.

Partisipasi politik Generasi Z dalam Pilkada 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sosialisasi politik dari penyelenggara pemilu seperti KPU serta adanya stigma politik yang berkembang di masyarakat (Dewi, 2022). Preferensi politik generasi ini juga sering dipengaruhi oleh lingkungan sosial terdekat, seperti keluarga atau tokoh yang dihormati, terutama di wilayah pedesaan (Khakim, 2023).

Penelitian “Model Partisipasi Politik Generasi Z di Media Sosial pada Pilkada 2024” menggunakan lima teori utama, yaitu Partisipasi Politik, Komunikasi Politik, serta *Social Media Political Participation Model* (SMPPM) yang mencakup Komunikasi Massa, *Self-Efficacy*, dan *Organizational Behavior*. Meskipun banyak kajian telah membahas partisipasi politik Generasi Z di media sosial, sebagian besar masih berfokus pada pemilu nasional dan belum menelaah secara mendalam bagaimana aktivitas digital mempengaruhi keputusan memilih dalam konteks pemilihan kepala daerah.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam memahami faktor spesifik yang mempengaruhi tingkat partisipasi Generasi Z secara aktif maupun pasif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis berbagai bentuk partisipasi politik Generasi Z di media sosial, serta menggambarkan sejauh mana keterpaparan dan keterlibatan Generasi Z dalam dinamika Pilkada 2024 melalui ruang digital

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang ada dalam penelitian ini, peneliti menemukan hal menarik untuk dijadikan acuan sebagai penelitian. Maka dari itu, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana paparan partisipasi politik Generasi Z melalui media sosial pada Pilkada 2024?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Ditinjau latar belakang serta masalah yang telah dipaparkan, peneliti memiliki tujuan, antara lain:

1. Mengetahui paparan partisipasi politik Generasi Z melalui media sosial pada Pilkada 2024?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna dalam ranah teoritis, praktis, akademis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan teori partisipasi politik dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang berperan

dalam mendorong partisipasi politik generasi muda, khususnya melalui media sosial. Tak hanya itu, Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana komunikasi politik melalui media sosial mempengaruhi sikap dan perilaku politik individu, terutama pemilih pemula.

2. Secara Praktis

Hasil kajian ini diharapkan mampu menjadi sumber pertimbangan penting bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menyusun strategi komunikasi politik yang lebih optimal, khususnya dalam menjangkau dan mempengaruhi pemilih pemula. Peneliti juga berharap bagi khalayak lebih tepatnya organisasi masyarakat sipil dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merancang program atau strategi pendidikan politik hingga rancangan pembelajaran politik yang lebih efisien tepat sasaran untuk generasi muda.

3. Secara Akademis

Kajian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam bidang pengetahuan ilmiah, terutama di ranah bidang ilmu politik dan komunikasi. Hasil kajian ini dapat memberikan landasan bagi penelitian lain dalam mengembangkan penelitian serupa dengan fokus yang berbeda. Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan ulasan atau ringkasan singkat dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk mendalami dan menegaskan topik yang sedang diteliti. Sebagai dasar pertimbangan yang

diperoleh melalui hasil kajian penelitian ini, maka akan disertakan beberapa studi kajian terdahulu. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, Jurnal Siti Wahyuni & M. Fachri Adnan, Universitas Negeri Padang dengan judul “Partisipasi Politik Generasi Milenial Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kota Padang”. membahas tingkat keterlibatan generasi milenial dalam pemilu presiden 2024. Penelitian kuantitatif deskriptif ini menggunakan sampel 100 responden usia 28-43 tahun dengan metode Multistage Random Sampling dan analisis statistik deskriptif serta korelasi Pearson. Hasil menunjukkan tingkat partisipasi politik generasi milenial hanya 29,48%, meskipun partisipasi dalam voting mencapai 81,62%, sedangkan keterlibatan dalam diskusi politik, kampanye, dan peran lain seperti relawan dan saksi pemilu sangat rendah. Korelasi antara jenis kelamin dan profesi terhadap partisipasi politik ditemukan negatif namun tidak signifikan secara statistik. Studi ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan aktif generasi milenial dalam politik. Adapun kesamaan pada penelitian ini adalah (1) keduanya menerapkan metode kuantitatif deskriptif, (2) memanfaatkan kuesioner/angket sebagai alat utama untuk memperoleh data, (3) fokus penelitian kepada partisipasi politik generasi muda. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah (1) terdapat pada objek penelitian antara generasi milenial di kota Padang dan Generasi Z di Indonesia pada Pilkada 2024. (2) fokus kajian penelitian terdahulu menekankan hubungan antara partisipasi politik dan faktor demografis sedangkan fokus kajian penelitian ini pada model

partisipasi politik Generasi Z di media sosial, (3) konteks pemilu, penelitian terdahulu meneliti Pilpres 2024 sedangkan penelitian ini peneliti Pilkada 2024.

Kedua, Jurnal Dimaz Oktama Andriyendi, Nurman S, & Susi Fitria Dewi dengan judul “Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada”. Jurnal ini mengkaji mengkaji dampak penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik pemilih pemula usia 17-23 tahun pada Pilkada Tanjung Jabung Timur 2020. Penelitian kuantitatif dengan metode Ex-Post Facto ini menggunakan 98 responden yang dipilih secara simple random sampling, serta dianalisis secara deskriptif dan regresi. Hasil menunjukkan pengaruh signifikan media sosial terhadap keterlibatan politik, dengan Adjusted R Square sebesar 0,306 yang berarti media sosial mempengaruhi 31% partisipasi politik pemilih pemula, dan nilai signifikansi 0,000 mendukung hipotesis penelitian. Kesimpulannya, semakin intensif penggunaan media sosial, semakin besar keterlibatan politik pemilih pemula. Studi ini menegaskan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik generasi muda.. Adapun persamaan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian dan metode penelitiannya. Sedangkan pembedanya yakni walaupun sama-sama menggunakan metode kuantitatif namun jenis pendekatan yang berbeda, penelitian terdahulu menggunakan jenis Ex-post Facto sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

Ketiga, Jurnal Lidia famoussyah, program Studi Politik Indonesia terapan, dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Partisipasi Politik

Generasi Z pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Solok Selatan". Jurnal ini membahas pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik Generasi Z dalam Pilkada 2020. Penelitian kuantitatif deskriptif dengan survei korelasional ini melibatkan 100 responden usia 17–20 tahun yang dipilih secara proportional random sampling. Analisis menggunakan regresi linear sederhana menunjukkan bahwa media sosial memberikan pengaruh signifikan sebesar 72,8% terhadap keterlibatan politik Generasi Z. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas di media sosial berbanding lurus dengan meningkatnya partisipasi politik pemilih muda. Penelitian menegaskan bahwa media sosial efektif sebagai alat penyebaran informasi sekaligus mendorong partisipasi politik, sehingga disarankan agar pemerintah dan pihak terkait memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi politik kepada generasi muda. Kesamaan antara penelitian ini dan studi sebelumnya adalah (1) keduanya fokus pada dampak media sosial terhadap partisipasi politik Generasi Z, (2) menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. (3) bentuk partisipasi politik generasi Z di media sosial. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu adalah (1) cakupan geografi dan pemilu yang dikaji, penelitian terdahulu berfokus pada Pilkada 2020 di kabupaten Solok Selatan, sedangkan penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas yakni Pilkada 2024 di Indonesia. (2) Studi sebelumnya mengkaji bahwa semakin banyak penggunaan media sosial, maka semakin besar partisipasi politik yang ditunjukkan, sedangkan penelitian ini berfokus pada model partisipasinya. (3) konteks infrastruktur dan aksesibilitas, pada penelitian terdahulu menyoroti

pada pentingnya infrastruktur telekomunikasi yang belum merata, sedangkan penelitian ini berfokus pada pola keterlibatan politik Generasi Z. (4) waktu penelitian, pada penelitian terdahulu dilakukan dalam konteks pilkada 2020, sedangkan pada penelitian ini pada Pilkada 2024.

Keempat, Jurnal Loso Judijanto, Hilarius Wandan, Nur Ayu, Andri Triyantoro, dan Suroso, dengan judul “Pengaruh Politik Identitas dan Penggunaan Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Digital Pemilih Milenial dan Gen Z di Indonesia”. Jurnal ini menyelidiki korelasi atau keterhubungan antara politik identitas dan aktivitas media sosial serta dampaknya terhadap partisipasi politik digital generasi milenial dan Z. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan angket terstruktur pada 200 responden dan dianalisis dengan SEM-PLS. Hasil menunjukkan pengaruh positif signifikan politik identitas dan penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik digital, di mana intensitas penggunaan media sosial memperkuat peran politik identitas dalam membentuk partisipasi. Penelitian menegaskan bahwa kedua faktor ini menjadi pendorong utama aktivitas politik digital di kalangan pemilih muda, namun juga menyoroti tantangan misinformasi dan polarisasi yang perlu diatasi agar partisipasi politik melalui media sosial dapat berlangsung inklusif dan produktif. Persamaannya adalah (1) berfokus pada Generasi Z dan partisipasi politik digital. (2) keduanya sama-sama menerapkan metode kuantitatif. Adapun pembeda penelitian ini adalah (1) variabel yang diteliti, yang mana penelitian terdahulu menghubungkan politik identitas dengan partisipasi politik digital, sedangkan penelitian ini berfokus pada fenomena partisipasi politik

Generasi Z di media sosial. (2) metode analisis data pada studi sebelumnya menggunakan SEM PLS 3, sementara penelitian ini menganalisis data dengan menerapkan teknik statistik deskriptif berlandas pada *Social Media Participation Politik Models* (SMPPM).

Kelima, Jurnal Noval Prasetyo, Asrinaldi,& Aidinil Zetra, dengan judul “Model Partisipasi politik Masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres tahun 2019”. Penelitian ini membahas pengaruh pandangan korupsi dan kepuasan hidup terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei dengan 1.000 responden yang dipilih melalui teknik multistage random sampling. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil menunjukkan bahwa persepsi korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik, sementara kepuasan hidup memiliki pengaruh positif signifikan. Partisipasi politik masyarakat tergolong “cukup baik” dengan skor rata-rata 58,2. Penelitian menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi politik, perlu upaya mengatasi isu korupsi dan meningkatkan kepuasan hidup masyarakat melalui strategi demokrasi yang inklusif. Persamaan penelitian ini dengan studi lain terletak pada fokus partisipasi politik dan penggunaan metode kuantitatif. Perbedaannya adalah pada variabel yang dianalisis—studi ini menitikberatkan pada pandangan korupsi dan kepuasan hidup, sementara studi lain fokus pada model partisipasi politik Generasi Z—serta metode analisis data yang berbeda, yaitu SEM

dibandingkan dengan analisis deskriptif statistik pada Social Media Participation Political Models (SMPPM).